Form A.00.00 TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong

Kab. Bogor 16917

Nomor Telepon : 021-83716747

Penjelasan Umum

Pada penerapan tata kelola dan manajemen risiko, BPR memiliki komitmen menjalankan tata kelola perbankan yang sehat secara konsisten. Dalam hal pelaksanaan tata kelola akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank, praktek penerapan tata kelola dan nilai-nilai perusahaan yang dianut oleh bank yaitu : 1. Moral, akhlak, integritas. 2. Semangat bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, peduli dan kerjasama. 3. Kompetensi. 4. Disiplin dan komitmen. 5. Tanggung jawab dan akuntabilitas. 6. Profesional. 7. Proporsional. 8. Interpedensi. Penerapan tata kelola mencakup berbagai aspek diantaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris serta komite pendukungnya, pengelolaan benturan kepentingan (conflict of interest), pengelolaan fungsi kepatuhan dan audit, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, penentuan batas kredit, perencanaan bisnis, serta transparansi kondisi keuangan perusahaan. Dalam menerapkan tata kelola tersebut, harus didasari oleh prinsip-prinsip utama tata kelola yang biasa dikenal dengan sebutan prinsip TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency, and Fairness). Penerapan tata kelola ini harus didukung oleh aturan dan pedoman pengelolaan, sehingga secara jelas dapat diterapkan oleh seluruh elemen perusahaan dan pelaksanaannya harus di evaluasi secara berkala.

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:48:25 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Boyzar Lukman	Direktur Utama	1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, 2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur adalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, 3. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, 4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: Fungsi audit intern, manajemen risiko, kepatuhan, 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, b. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. 7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai, 9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, 10. Wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan Tata Kelola dan Kebijakan lain yang berlaku, 11. Wajib melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, 12. Mengawasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, 13. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:06:37 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	TB Frandy Priya Purwanto	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Memahami dan mengerti visi, misi BPR Artha Kurnia Raharja pada setiap pekerjaan serta mengamalkan Motto karyawan "melayani sepenuh hati, handal dan terpercaya". 2. Menjalankan 8 prinsip budaya kerja BPR Artha Kurnia Raharja. 3. Melaksanakan fungsi manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). 4. Melaksanakan Penilaian Hasil Kinerja seluruh bawahannya (KPl) minimal 2 kali dalam setahun. 5. Melaksanakan fungsi disiplin kepada bawahan yang tidak disiplin dengan menerbitkan surat teguran, surat peringatan (SP) dan surat pengusulan pemberhentian (PHK) kepada Direktur Utama. 6. Melakukan hak dan kewajiban sebagai Direktur Kepatuhan yang membawahi fungsi operasional serta administrasi. 7. Memonitor semua kegiatan operasional dan menjamin lancarnya "Flow of Work" dan "Flow of Document" guna produktivitas personil dilingkungan bagian operasional dan administrasi. 8. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. 9. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank. 10. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. 12. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direktur Utama Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan yang berlaku. 13. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi kepatuhan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:06:37 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 2

^{1.} Membuat perhitungan bagi debitur restruk covid yang tunggakannya sudah > 90 hari, untuk mengetahui jumlah PYAD yang masih diakui sebagai pendapatan. 2. Membuat proyeksi NPL, Laba & Beban biaya sd bulan Desember 2021 untuk mengetahui estimasi hasil akhir tahun. 3. Action plan untuk debitur-debitur NPL kol 3,4,5 (rollback/restruk/lunas). 4. Penanganan terhadap debitur yang sudah par agar tidak migrasi ke kol 3. 5. Pembentukan tim satgas NPL, AYDA & Hapus buku. 6. Review debitur-debitur NPL, restruk covid, AYDA, Hapus buku di fokuskan dan harus ada progresnya serta data tersebut dimapping untuk mendapat gambaran yang paling prioritas & rasional agar secepatnya selesai. 7. Penyusunan rencana bisnis BPR mencakup point-point pertumbuhan rencana bisnis, isu-isu strategis dan kebijakan strategis. 8. Melakukan review dengan melakukan kunjungan setelah pencairan kredit untuk meminimalisir risiko kredit

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ano Kurniadi	Komisaris Utama	1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a). penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dan b). hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a). pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR
2	Andreas Heryjanto Gondoseputro	Komisaris	1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pint (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a). penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, dan b). hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a). pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR

Rekomendasi Kepada Direksi

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:07:23 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 2

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

1. Pengelolaan NPL harus fokus dan berdasarkan skala prioritas sesuai tingkat keberhasilan. 2. Bagian PKB harus punya solusi untuk debitur NPL (Tagih/restruk/Lunas/AYDA/PH). 3. Evaluasi debitur yang restruk covid, dilakukan asesmen satu persatu dan sesuaikan perhitungan ke depan dengan beban PPAP, nilai HT, NPL sesuai POJK 33. Agar risikonya terukur, tidak ada moral hazard. 4. Pengelolaan digital marketing dioptimalkan. 5. Bank harus menerapkan manajemen risiko dengan membentuk cadangan PPAP, perhitungan reverse accrual bunga untuk debitur yang dinilai sudah tidak mampu bertahan, karena akan berpengaruh pada laba riil dan ketahanan modal BPR. 6. Segera dibuatkan SK untuk pembentukan satgas sebagai salah satu power untuk mengatur strategi terkait kinerja BPR sampai dengan bulan Desember 2021. 7. Rencana bisnis yang realistis, terukur dan dapat dicapai. 8. Debitur-debitur dengan OS tinggi/prioritas harus di fikirkan tiap jam, progress setiap hari harus tercatat (fokus & konsentrasi). 9. Bagian remedial/PKB tidak kenal jam dalam penagihan, NPL harus bisa lebih kecil dari target sebelumnya. 10. Pertumbuhan kredit harus yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:07:23 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 2

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:09:08 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:09:32 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:10:10 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.02.10

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:10:49 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.02.20

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:11:33 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.03.10

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain Anggota Dewan Komisaris		Pemegang Saham
1	Boyzar Lukman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	TB Frandy Priya Purwanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:13:03 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

		Hubungan Keluarga		
No	Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Boyzar Lukman	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	TB Frandy Priya Purwanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:17:00 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:13:30 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.04.20

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)		
1					
	Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)				

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:13:56 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ano Kurniadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Andreas Heryjanto Gondoseputro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:14:23 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

		Hubungan Keluarga		
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ano Kurniadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Andreas Heryjanto Gondoseputro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:14:46 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	456000000	2	228000000
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		456000000		228000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Satu Direksi baru menjabat pada tanggal 11 November 2021, dan satu Direksi baru ada kenaikan gaji pokok perbulan Februari 2021. Satu Komisaris baru menjabat pada tanggal 11 November 2021, dan satu komisaris baru ada kenaikan gaji pokok perbulan Maret 2021.

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:15:12 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.06.20

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)		
		Direksi	Dewan Komisaris	
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada	
2	Transportasi	Tidak ada	Satu komisaris mendapatkan fasilitas berupa tunjangan transportasi	
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada	
4	Fasilitas lainnya	Direksi mendapatkan fasilitas komunikasi	Satu komisaris mendapatkan fasilitas komunikasi	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:15:51 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.07.00 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

		Perband	dingan
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,95	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,23	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,05	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,08	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,73	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:16:31 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com

Form A.08.10 Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

1 dari 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13-02-2021	3	Langkah-langkah peningkatan kinerja BPR
2	19-04-2021	3	Evaluasi kinerja pada triwulan I 2021
3	05-10-2021	2	Proyeksi untuk target kinerja sd bulan Desember 2021
4	11-10-2021	2	Evaluasi hasil rapat Dekom BPR Saudara Group tanggal 08 Oktober 2021
5	20-11-2021	4	Rencana Bisnis BPR (RBB) tahun 2022
6	22-12-2021	3	Meeting Koordinasi 1
7	23-12-2021	3	Meeting Koordinasi 2

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Baru ada 1 (satu) penambahan komisaris pada tanggal 11 November 2021.

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:05:30 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com

Form A.08.20 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuens	si Kehadiran	Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ano Kurniadi	7	0	100,00
2	Andreas Heryjanto Gondoseputro	2	0	28,57

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Baru ada 1 (satu) penambahan komisaris pada tanggal 11 November 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 13:03:26 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.09.00

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris Pegawai Tetap		ai Tetap	Pegawai Tidak Tetap		
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:59:41 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.10.00

Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)		
	Perdata	Pidana	
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0	
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	
Total	0	0	

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:58:50 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:50:15 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form A.12.00

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20211001	Kegiatan Sosial	Bantuan Sumbangan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW di mesjid Ciawi	Panitia Acara Maulid	300.000
2	20211129	Kegiatan Sosial	Bantuan Sumbangan Pembangunan Pondok Pesantren Di Banten	Panitia Pembangunan Pondok Pesantren Di Banten	50.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:49:40 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31-12-2021

Alamat : Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong

Kab. Bogor 16917

Nomor Telepon : 021-83716747

Modal Inti BPR : 3.188.317.000,00

Total Aset BPR : 25.881.503.190,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,8

Peringkat Komposit : 2

Analisis

: Berdasarkan Hasil Assesment pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Kurnia Raharja tahun 2021 mendapatkan hasil dengan predikat baik dengan nilai 1,786 terlihat dari 11 faktor tata kelola yang telah diterapkan oleh BPR dengan rata-rata predikat setiap faktor adalah baik, Faktor 1. Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan. Faktor 2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan sebagai fungsi pengawasan, Faktor 3. Tugas pelaksanaan fungsi komite pada BPR Artha Kurnia Raharja tidak membentuk komite, Faktor 4. Benturan Kepentingan, tidak ada benturan kepentingan, BPR terus berupaya untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, Faktor 5. Penerapan fungsi kepatuhan, BPR telah melaksanakan fungsi kepatuhan dan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi kepatuhan serta budaya kepatuhan di setiap unit kerja, Faktor 6. Penerapan fungsi audit intern, Audit intern telah melaksanakan fungsinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan tindak lanjut hasil audit berdasarkan time line yang telah dibuat, 7. Penerapan fungsi audit ekstern, Audit ekstern telah dilaksanakan oleh BPR yaitu menjalin kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK, Faktor 8, 9, 10 dan 11 BPR telah menerapkan manajemen risiko, memiliki kebijakan dan prosedur meskipun masih ada sebagian yang belum diterapkan tetapi untuk kedepannya akan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan agar setiap unit kerja sadar akan risiko serta BPR akan menyediakan sistem informasi manajemen yang memadai. Dalam hal penerapan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagian telah diterapkan untuk tindak lanjutnya BPR secara bertahap akan menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan optimal. Transparansi keuangan BPR telah melakukan publikasi laporan keuangan secara triwulanan dan tahunan, terkait rencana bisnis BPR telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:51:17 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 1

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,70	0,22	1,42	0.284	BPR telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,60	0,20	1,36	0.204	Bank telah memenuhi aturan/ketentuan OJK terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Tidak ada fungsi komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	Tidak ada benturan kepentingan baik dari pihak Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	1,04	0,27	2,31	0.231	BPR telah melakukan pembentukan fungsi kepatuhan dengan menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan manajemen risiko
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah melakukan pembentukan fungsi audit intern dengan menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Bpr telah melakukan penunjukan fungsi audit ekstern yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,32	0,30	2,79	0.279	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, serta Pejabat Eksekutif audit intern yang melaksanakan sistem pengendalian intern
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,20	1,50	0.113	BPR telah memiliki kebijakan, sistem & prosedur terkait BMPK

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:51:45 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 2

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi misi BPR, serta telah di dukung sepenuhnya oleh pemegang saham
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Sistem pelaporan keuangan yang didukung pleh sistem informasi manajemen dan SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh. BPR telah menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:51:45 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 2

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Saat ini PT BPR Artha kurnia Raharja dengan modal inti kurang dari Rp 50 M dengan posisi pengurus sd 31 Desember 2021 yaitu 1 Direktur Utama dan 1 Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direktur Utama PT BPR Artha Kurnia Raharja yaitu Bapak Boyzar Lukman bertempat tinggal di Depok (Jawa Barat), dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu Bapak TB Frandy Priya Purwanto bertempat tinggal di Bogor (Jawa Barat)
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan non Bank dan atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Tidak menggunakan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telang diangkat oleh RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:52:58 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:52:58 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi tidak pernah memberi kuasa umum dan wewenang tanpa batas kepada siapapun
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah sepenuhnya menyediakan data yang lengkap dan tepat waktu
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi telah mengambil keputusan yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat/sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Telah dilakukan pengembangan SDM melalui program pendidikan pelatihan bagi seluruh karyawan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan Tata Kelola
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:52:58 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:52:58 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Setiap kebijakan Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Setiap hasil rapat dibuatkan notulennya
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Dari hasil realisasi tahun 2021, sudah ada peningkatan kinerja BPR yan mulai mendapatkan hasil positif dengan memperoleh laba, namun hasilnya masih belum maksimal.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebelum batas waktu yang ditetapkan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,22	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:52:58 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 5 dari 6

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:52:58 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 6 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sampai dengan posisi 31 Desember 2021 PT BPR Artha Kurnia Raharja dengan modal inti kurang dari Rp 50 M dengan anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama PT BPR Artha Kurnia Raharja yaitu Bapak Ano Kurniadi yang bertempat tinggal di Kota Depok (Jawa Barat) dan Komisaris yaitu Bapak Andreas Heryjanto G. yang bertempat tinggal di Kota Tanggerang (Banten)
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR masih dibawah Rp 50 M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Komisaris Utama hanya merangkat jabatan pada 2 (dua) BPR lain, dan untuk Komisaris hanya merangkat jabatan pada 1 (satu) BPR lain.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:53:29 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:53:29 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Tidak ada
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa direksi menindaklanjuti semua temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut dari temuan tersebut
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:53:29 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:53:29 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 6

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dewan Komisaris didalam pengambilan keputusan rapat bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris hanya mempergunakan remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:53:29 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 5 dari 6

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:53:29 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 6 dari 6

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:54:06 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 4

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:54:06 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 4

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:54:06 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 4

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:54:06 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat. Namun sudah dituangkan dalam prosedur dan kebijakan perkreditan BPR kepada pihak terkait
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Manajemen risiko dan audit intern mengambil langkah preventif, ketika sesuatu hal mengarah pada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Jika ada benturan kepentingan maka akan terdokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:54:36 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:54:36 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 4

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:54:36 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 4

Rutin

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:54:36 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 4

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar	1	Modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50 M dan terdapat Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut tidak menangani dalam hal penyaluran dana
	rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami peraturab Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Modal inti BPR masih kurang dari Rp. 50 M, telah difungsikan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara bertahap menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:04 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:04 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar BPR taat dan patuh terhadap seluruh peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya untuk terus menumbuhkan budaya kepatuhan BPR dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkesinambungan agar dapat memahami dan menyadari tentang pentingnya budaya kepatuhan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR terus mengoptimalkan mitigasi risiko untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:04 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:04 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telahmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Jika terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan maka Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan membuat laporan khusus untuk disampaikan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:04 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 5 dari 6

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:04 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 6 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar	1	PT BPR Artha Kurnia Raharja dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M, sudah memiliki 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disejutui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, namun belum sepenuhnya dilaksanakan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional, sebagian besar sudah diterapkan dan dipenuhi sesuai dengan pedoman Tata Kelola
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sebagain besar sudah diterapkan dan dipenuhi sesuai dengan pedoman Tata Kelola
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikutsertakan pelatihan terkait tugas dan fungsinya sebagai audit intern
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:42 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:42 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Sebagian besar sudah diterapkan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit berdasarkan pada time line yang telah dibuat
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern melalui pelatihan-pelatihan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah berjalan sesuai pedoman
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan sudah disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:42 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:42 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	-
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:42 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 5 dari 6

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:55:42 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 6 dari 6

Rutin

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Prosedur penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Telah sepenuhnya dilakukan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah sepenuhnya dilakukan

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:56:17 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 4

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:56:17 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 4

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:56:17 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 4

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:56:17 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 4

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;	1	Modal inti kurang dari Rp. 50 M, BPR telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi penerapan manajemen risiko
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.		
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki pedoman terkait kebijakan Manajemen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi telah meyusun kebijakan Manajemen Risiko, serta telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:05 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:05 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Sebagian telah diterapkan atau dipenuhi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Sebagian telah diterapkan BPR dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material sesuai dengan pedoman Manajemen Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Sebagian telah diterapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sebagian telah diterapkan sampai dengan 31 Desember 2021, BPR mengelola 3 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	5	BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Sebagian telah diterapkan dalam hal Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko dan mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko, namun tidak semua jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
	Total nilai skala penerapan	23	
	Rata-rata	3,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,32	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	BPR belum memiliki produk atau aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:05 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:05 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:05 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 5 dari 6

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:05 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 6 dari 6

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:26 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 4

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

2 dari 4 Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:26 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:26 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 4

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:26 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 4

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan inftastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:47 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 1 dari 4

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:47 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 4

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		Rencana bisnis dan jika ada perubahan rencana bisnis BPR melakukan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:47 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 4

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:57:47 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 4

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sudah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan melaporkan laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan dan telah melaporkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

1 dari 4 Tanggal Cetak 27/04/2022 12:58:15 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:58:15 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 2 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan di sampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:58:15 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 3 dari 4

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Tanggal Cetak 27/04/2022 12:58:15 WIB Dicetak Oleh kartikasutrisno13@gmail.com 4 dari 4

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ARTHA KURNIA RAHARJA **TAHUN 2021**



Cibinong, 25 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

Direktur Utama

Ano Kurniadi

Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Artha Kurnia Raharja

Alamat : Komplek Ruko Mayor Oking II Blok A2 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor

No Telp : 021-83716747/42

Posisi Laporan : 2021

Modal Inti : 3.188.317.000

Total Aset : 25.881.503.190

Status Audit : 1 (Diaudit oleh KAP)

Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,786
Peringkat Komposit : 2 (Baik)

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Assesment pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Kurnia Raharja tahun 2021 mendapatkan hasil dengan predikat "baik" dengan nilai 1,786 terlihat dari 11 faktor tata kelola yang telah diterapkan oleh PT. BPR Artha Kurnia Raharja dengan rata-rata predikat setiap faktor adalah baik, Faktor 1. Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan, Faktor 2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan sebagai fungsi pengawasan, Faktor 3. Tugas pelaksanaan fungsi komite pada PT. BPR Artha Kurnia Raharja tidak membentuk komite karena modal inti masih dibawah 50 Miliar, Faktor 4. Benturan Kepentingan, Pada BPR Artha Kurnia Raharja tidak ada benturan kepentingan, BPR terus berupaya untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, Faktor 5. Penerapan fungsi kepatuhan, BPR telah melaksanakan fungsi kepatuhan dan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi kepatuhan serta budaya kepatuhan di setiap unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Faktor 6. Penerapan fungsi audit intern, Audit intern telah melaksanakan fungsinya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan audit mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit berdasarkan time line yang telah dibuat, 7. Penerapan fungsi audit ekstern, Audit ekstern telah dilaksanakan oleh BPR yaitu menjalin kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK untuk melakukan audit terkait laporan keuangan BPR secara transparan, Faktor 8, 9, 10 dan 11 BPR telah menerapkan manajemen risiko, memiliki kebijakan dan prosedur meskipun masih ada sebagian yang belum diterapkan tetapi untuk kedepannya akan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan agar setiap unit kerja sadar akan risiko serta BPR akan menyediakan sistem informasi manajemen yang memadai. Dalam hal penerapan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagian telah diterapkan untuk tindak lanjutnya BPR secara bertahap akan menerapkapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan optimal. Transparansi keuangan BPR Artha Kurnia Raharja telah melakukan publikasi laporan keuangan secara triwulanan dan tahunan, terkait rencana bisnis BPR telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Cibinong, 25 April 2022

Boyzar Lukman

Direktur Utama

Ano Kurniadi

Komisaris Utama